



MELIHAT KEHIDUPAN MISKIN KOTA PERSPEKTIF TUKANG SAPU JALANAN

Sry Ayu Astuti Sitohang

Universitas Sumatera Utara

Kuperju Syahputra

Universitas Sumatera Utara

Alamat: Jalan Dr. T.Mansyur. Padang Bulan, Kota Medan, 200155

Korespondensi penulis: sryayusitohang@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine how the lives of street sweepers in the city can be improved and how they can gain better access to health services, education, and economic opportunities. This research aims to provide new insights into the lives of street sweepers in the city. By using the Theory of Social Poverty as a basis for understanding poverty as a social problem. This research uses secondary data and personal observations as a means of data collection, which will then be explained using a descriptive qualitative method. Poverty in urban Indonesia is still a serious issue, with the percentage of poor people reaching 7.29% in 2023. Street sweepers are included in the category of laborers with characteristics of manual work, low wages, and minimal social security. To survive, they are forced to live in slums, reduce social activities, and even borrow money with high interest rates. The government has made efforts to improve their welfare, but the implementation still faces challenges such as budget limitations and difficulties in reaching informal workers.*

Keywords: *Poverty, Social, perspective*

Abstrak. Pada penelitian ini ingin melihat bagaimana kehidupan tukang sapu jalanan di kota dapat diperbaiki dan bagaimana mereka dapat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang kehidupan tukang sapu jalanan di kota. Dengan menggunakan Teori kemiskinan Sosial sebagai landasan pemahaman tentang kemiskinan merupakan masalah sosial. Penelitian ini menggunakan data skunder dan pengamatan pribadi sebagai cara pengumpulan data, yang nantinya dijelaskan dengan metode kualitatif deskriptif. Kemiskinan di perkotaan Indonesia masih menjadi isu serius dengan persentase penduduk miskin mencapai 7,29% pada 2023. Tukang sapu jalanan termasuk dalam kategori buruh dengan karakteristik pekerjaan yang manual, upah rendah, dan minimnya jaminan sosial. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa tinggal di pemukiman kumuh, mengurangi aktivitas sosial, dan bahkan meminjam uang dengan bunga tinggi. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan kesulitan menjangkau pekerja informal.

Kata kunci: Kemiskinan, Sosial, perspektif

LATAR BELAKANG

Kehidupan miskin di kota merupakan isu yang serius dan kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis. Dalam konteks ini, tukang sapu jalanan seringkali menjadi sasarannya, karena mereka seringkali dianggap sebagai bagian dari infrastruktur kota yang kurang penting. Namun, kehidupan mereka sebenarnya jauh lebih kompleks dan memiliki berbagai tantangan serta potensi yang belum sepenuhnya dipahami. Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa tukang sapu jalanan memiliki peran penting dalam kehidupan kota, tetapi juga menghadapi berbagai kesulitan, termasuk ketidakstabilan ekonomi, kekurangan akses terhadap layanan kesehatan, dan ketidakadilan sosial. Pada penelitian ini ingin melihat bagaimana kehidupan tukang sapu jalanan di kota dapat diperbaiki dan bagaimana

mereka dapat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi (Patel, R. 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada dan memberikan wawasan baru tentang kehidupan tukang sapu jalanan di kota. Kebaruan dari artikel ini terletak pada pendekatan yang unik dalam memahami kehidupan tukang sapu jalanan, yang sebelumnya jarang diperhatikan dalam penelitian sosial. Artikel ini menawarkan perspektif baru tentang tantangan dan potensi yang mereka hadapi, serta bagaimana mereka beradaptasi dalam kehidupan kota yang dinamis dan kompleks.

Persentase kemiskinan di kota merupakan isu serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Berdasarkan data dari BPS, pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,29 persen, atau 11,74 juta orang, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,88 juta orang dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di perkotaan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, meskipun ada upaya untuk menurunkannya kembali. Selain itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 adalah 1,163, sedangkan pada September 2019 sebesar 1,015. Indeks keparahan kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 adalah 0,281, lebih tinggi dibandingkan dengan September 2019 yang 0,233. Penurunan kemiskinan kota yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan desa menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, urbanisasi yang tak didukung kesiapan kota juga perlu dievaluasi bersama, karena semakin meningkat jumlah penduduk di perkotaan, kebutuhan perumahan juga meningkat, dan warga miskin atau tak mampu sering terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak, berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup mereka (Retnosari, 2023).

KAJIAN TEORITIS

Teori Kemiskinan Sosial adalah pendekatan yang mengkaji kemiskinan dari perspektif struktural dan fungsional dalam masyarakat. Teori ini menekankan pada bagaimana struktur sosial dan fungsional dari masyarakat mempengaruhi kemiskinan. Dalam konteks ini, struktur sosial merujuk pada bagaimana masyarakat diorganisir dan bagaimana hubungan antar individu dan kelompok di dalamnya dibentuk. Fungsional, di sisi lain, merujuk pada bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana sumber daya dialokasikan dan digunakan dalam masyarakat tersebut. Teori Kemiskinan Sosial mendefinisikan kemiskinan sebagai hasil dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, serta ketidakadilan dalam sistem pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya akses terhadap sumber daya material, tetapi juga tentang bagaimana struktur sosial dan fungsional dari masyarakat mempengaruhi kemampuan individu dan kelompok untuk mengakses sumber daya dan layanan yang mereka butuhkan (Rosana, E. 2019).

Dalam teori ini, kemiskinan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuasaan, ketidaksetaraan, dan pengaruh sosial. Teori Kemiskinan Sosial menunjukkan bahwa kemiskinan, termasuk posisi tukang sapu jalanan, sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan fungsional dari masyarakat. Dalam konteks ini, tukang sapu jalanan seringkali berada di posisi yang paling rendah dalam hierarki sosial dan ekonomi, yang mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya dan layanan. Struktur sosial yang tidak adil dan tidak stabil dapat menciptakan kesenjangan yang mempengaruhi kemiskinan. Misalnya, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, serta ketidakadilan dalam sistem pendidikan dan kesehatan, dapat menyebabkan tukang sapu jalanan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan ekonomi yang adil. Kekuasaan yang tidak tersebar secara merata juga mempengaruhi posisi tukang sapu jalanan. Mereka seringkali dianggap sebagai bagian dari infrastruktur kota yang kurang penting, yang dapat menyebabkan mereka menghadapi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang lebih besar dalam akses terhadap sumber daya dan layanan. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan juga menjadi penyebab utama kemiskinan tukang sapu jalanan. Mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan penghasilan yang stabil dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak (Budi Suharto, R. 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dipilih sebagai metode pemecah masalah. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena. Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, Lexy J, 2010). Metode pengumpulan data. Artikel ini menggunakan dokumen dan data sekunder sebagai bahan rujukannya, Sumber tersebut di kumpulkan dari data sekunder berupa laporan, artikel, dan studi terdahulu yang relevan dengan kehidupan tukang sapu jalanan. Selain itu Mengamati fenomena sosial secara langsung yang dirasakan dan dilihat penulis juga dijadikan salah satu cara untuk mengumpulkan data berdasarkan pengalaman pribadi. Metode analisis Data. Analisis data merupakan proses mendalami, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk memperoleh pemahaman dan temuan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis mulai dari menelaah seluruh data, mengonstruksi dan mengorganisir data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, kemudian melakukan pemeriksaan keabsahan data, hingga menafsirkan dan memaknai data tersebut untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan dan kemiskinan di kota, khususnya bagi para pekerja sapu jalanan, seringkali dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu indikator utama adalah tingkat pengangguran. Dalam banyak kasus, pekerjaan yang tidak stabil dan kurang terjaga, seperti yang ditemukan pada pekerja sapu jalanan, dapat meningkatkan risiko kemiskinan. Misalnya, jika tingkat pengangguran di kota mencapai 10%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan yang tersedia tidak memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga menjadi faktor penting. Pekerja sapu jalanan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka dan keluarga mereka. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan risiko kemiskinan.

Persentase kemiskinan di kota merupakan isu serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Berdasarkan data dari BPS, pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,29 persen, atau 11,74 juta orang, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,88 juta orang dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di perkotaan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, meskipun ada upaya untuk menurunkannya kembali. Selain itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 adalah 1,163, sedangkan pada September 2019 sebesar 1,015. Indeks keparahan kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 adalah 0,281, lebih tinggi dibandingkan dengan September 2019 yang 0,233 (BPS, 2023)

Kemiskinan di perkotaan tidak hanya ditandai oleh jumlah penduduk miskin, tetapi juga oleh kesenjangan pengeluaran yang signifikan antara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Penurunan kemiskinan kota yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan desa menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, urbanisasi yang tak didukung kesiapan kota juga perlu dievaluasi bersama, karena semakin meningkat jumlah penduduk di perkotaan, kebutuhan perumahan juga meningkat, dan warga miskin atau tak mampu sering terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak, berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup mereka (Budi Suharto, R. 2016).

Perspektif tukang sapu jalanan terhadap kemiskinan yang mereka rasakan sebagai tukang sapu jalan dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek (Laporan Hasil Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran. 2010). Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dijelaskan:

1. Pendapatan dan kebutuhan: Tukang sapu jalanan mungkin melihat kemiskinan sebagai masalah yang terkait dengan pendapatan yang rendah dan kebutuhan yang

tidak terpenuhi. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan (tempat tinggal), kesehatan, pendidikan, bahan bakar, dan transportasi.

2. Kerja dan upah: Tukang sapu jalanan mungkin melihat kemiskinan sebagai masalah yang terkait dengan kerja yang tidak stabil dan upah yang rendah. Mereka mungkin bekerja dengan sistem sip pagi dan sore, upah yang tidak teratur, dan upah yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Kesejahteraan rumah tangga: Tukang sapu jalanan mungkin melihat kemiskinan sebagai masalah yang terkait dengan kesejahteraan rumah tangga yang tidak terpenuhi. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan kesejahteraan rumah tangga, seperti ketidakmampuan dalam mengatur keuangan, mengatur waktu, dan mencapai tujuan kebutuhan keluarga.
4. Sosial: Tukang sapu jalanan mungkin melihat kemiskinan sebagai masalah yang terkait dengan sosial yang tidak memadai. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan, seperti ketidakmampuan dalam mengatur hubungan sosial, menggunakan fasilitas sosial yang tidak efisien, dan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tukang sapu jalanan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu program yang diluncurkan adalah pemberian bantuan sosial bagi pekerja informal, termasuk tukang sapu jalanan. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2022 pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 10 juta pekerja informal (Kemensos, 2022). Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pekerja informal yang penghasilannya tidak tetap.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses tukang sapu jalanan terhadap jaminan sosial. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2023 cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 83% dari total penduduk Indonesia, termasuk pekerja informal (Kemnaker, 2023). Upaya ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya kesehatan bagi tukang sapu jalanan. Sayangnya, implementasi program-program tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, dan kesulitan dalam menjangkau pekerja informal yang tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tukang sapu jalanan di Indonesia.

Tukang Sapu Jalanan Dalam Kategori Buruh

Pekerja tukang sapu jalanan dapat dikategorikan sebagai buruh berdasarkan beberapa faktor penting. Sifat pekerjaan mereka yang manual dan membutuhkan tenaga fisik, tanpa kendali atas alat produksi atau pembuatan keputusan, merupakan ciri khas pekerjaan buruh (Effendi, 2019). Selain itu, status hukum dan ekonomi mereka juga mencerminkan kondisi buruh, dengan tidak adanya kontrak kerja yang jelas, upah rendah, dan kurangnya jaminan sosial (Simanjuntak, 2021). Hubungan kerja yang ditandai

dengan pengawasan dan arahan dari atasan serta kurangnya otonomi dalam menentukan metode kerja juga menjadi indikator bahwa tukang sapu jalanan termasuk dalam kelompok buruh (Pratama, 2022). Karakteristik pekerja tukang sapu jalanan yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat kurang beruntung secara ekonomi dan sosial, serta minimnya keterampilan dan pendidikan formal, memperkuat argumen bahwa mereka tergolong sebagai tenaga buruh (Sari, 2020).

Gaji rata-rata buruh sebagai tukang sapu di Indonesia umumnya masih berada di bawah standar upah minimum regional (UMR). Menurut Kementerian Tenaga Kerja, pada tahun 2022 upah minimum rata-rata di Indonesia adalah Rp 2,8 juta per bulan (Kemnaker, 2022). Namun, para tukang sapu jalanan hanya menerima upah harian atau mingguan yang jauh lebih rendah, sekitar Rp 50.000 - Rp 80.000 per hari (Suwandi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan mereka sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Rendahnya gaji tukang sapu jalanan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya standarisasi upah, minimnya perlindungan hukum, dan keterbatasan akses mereka terhadap sumber daya ekonomi (Utami, 2020). Menurut Suwandi (2021), "Selain upah yang rendah, mereka juga umumnya tidak memiliki jaminan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya." Kondisi ini mencerminkan posisi tawar yang lemah dari pekerja tukang sapu jalanan dalam pasar tenaga kerja.

Bertahan Hidup dalam Tekanan Ekonomi sebagai Tukang Sapu Jalanan

Tukang sapu jalanan yang bekerja di kota-kota besar Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat kesenjangan ekonomi yang tinggi. Gaji harian mereka, yang berkisar antara Rp 50.000 - Rp 80.000, jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR) yang rata-rata Rp 2,8 juta per bulan pada tahun 2022 (Kemnaker, 2022). Upah yang rendah tersebut hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan dalam porsi yang terbatas, sementara biaya hidup di perkotaan relatif tinggi (Sari, 2022). Untuk bertahan hidup, para tukang sapu jalanan seringkali harus tinggal di pemukiman kumuh dan mengirimkan sebagian penghasilannya ke keluarga di kampung halaman (Pratama, 2021). Dalam kondisi ekonomi yang sulit, mereka terkadang terpaksa meminjam uang dengan bunga yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan mendesak (Suwandi, 2020). Selain itu, minimnya jaminan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya, seperti asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, semakin mempersulit kondisi ekonomi mereka.

Dalam upaya bertahan hidup, para tukang sapu jalanan terpaksa harus membatasi aktivitas sosial dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Kondisi ini tentunya berdampak pada kesejahteraan mental dan sosial mereka dalam jangka panjang. Dengan pendapatan yang sangat minim, tukang sapu jalanan di perkotaan Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Mereka terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kehidupan tukang sapu jalanan di perkotaan Indonesia menghadapi tantangan besar akibat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kemiskinan di perkotaan merupakan isu serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, dengan persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,29% pada Maret 2023, menunjukkan peningkatan sejak sebelum pandemi. Tukang sapu jalanan termasuk dalam kategori buruh berdasarkan karakteristik pekerjaan mereka yang manual dan membutuhkan tenaga fisik, status hukum dan ekonomi dengan upah rendah serta minimnya jaminan sosial, serta hubungan kerja yang ditandai dengan pengawasan dan kurangnya otonomi. Gaji rata-rata tukang sapu jalanan jauh di bawah upah minimum regional, hanya sekitar Rp 50.000 - Rp 80.000 per hari, menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dalam upaya bertahan hidup, tukang sapu jalanan terpaksa tinggal di pemukiman kumuh, mengirimkan sebagian penghasilan ke keluarga, dan bahkan meminjam uang dengan bunga tinggi. Kondisi ini memaksa mereka harus mengurangi aktivitas sosial, berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan sosial mereka. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tukang sapu jalanan, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan kesulitan menjangkau pekerja informal.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2023*. ISSN/ISBN : 2087-2216.
- Budi Suharto, R. 2016. "Karakteristik Sosial Ekonomi Anak Jalanan Kota
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 2023. *Laporan Tahunan Ketenagakerjaan 2023*. Jakarta: Kemnaker.
- Kementerian Sosial (Kemensos). 2022. *Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial 2022*. Jakarta: Kemensos.
- Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). 2022. *Laporan Tahunan Ketenagakerjaan 2022*. Jakarta: Kemnaker, hal. Strategis Nasional Tahun Anggaran. 2010. *Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan 45*.
- Laporan Hasil Penelitian *Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal*. No. 533/SP2H/PP/DP2M/VII/2010
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pdf.Bandung: Remaja Rosdakarya Press.
- Patel, R. 2019. "The Role of Street Sweepers in Urban Development: A Review." *Journal Urban Studies* Vol 56 No 1: 1-15.
- Pratama, B. 2022. *Ekonomi Tenaga Kerja*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Retnosari, Lili. Kemiskinan di Perkotaan . September 20, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/19/kemiskinan-di-perkotaan> (accessed April 17, 2024).

- Rosana, E. (2019). “Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional.” *Jurnal Al-Adyan* Vol 14 No 1: 21-18
Samarinda”. *Jurnal Forum Ekonomi* Vol 18 No 1:56-61
- Sari, D. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Simanjuntak, P. (2021). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. Hal 54.
- Suwandi. 2021. “Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja Informal di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial* Vol 15 No 2: 92-102.
- Utami, R. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.